

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan seluruh masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan nasional yaitu mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pembangunan dimasing-masing daerah harus mendapat perhatian pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah terus mengalami peningkatan. Pembangunan daerah sangat perlu diarahkan dan diatur dengan peraturan daerah masing-masing agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan perekonomian nasional.

Indonesia terdiri atas 33 provinsi dan 530 kabupaten/kota (Ditjen Otda Depdagri,2012), Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang membentang luas dari Sabang sampai Maruke, yang memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan yang merata. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor yang dapat didayagunakan atau dikembangkan sehingga dapat mendorong laju perekonomian daerah dan meningkatkan perekonomian nasional. Pembangunan

ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pemerintah pusat membuat suatu desentralisasi fiskal, yaitu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Penerapan desentralisasi fiskal sebagai wujud dari otonomi daerah, suatu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom adalah kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri dan meminimalkan bantuan daerah dari pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai rumah tangga dan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah atau disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah. Pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri dan kemudian akan mendorong pembangunan nasional yang berkesinambungan mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi suatu daerah perlu pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat atau swasta dalam hal ini untuk mengelola sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut. Kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki sangat menentukan kemandirian daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah sampai selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada $70^{\circ}33' - 8^{\circ}12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}00' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dengan luas $3.185,80 \text{ km}^2$. Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

Tabel 1.1
Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

| Kabupaten/Kota | Luas Area | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Kota Yogyakarta | 32,50 km ² | 14 kecamatan | 45 kelurahan |
| Kab. Bantul | 506,85 km ² | 17 kecamatan | 75 desa |
| Kab. Kulonprogo | 586,27 km ² | 12 kecamatan | 88 desa |
| Kab. Gunungkidul | 1.485,36 km ² | 18 kecamatan | 144 desa |
| Kab. Sleman | 574,82 km ² | 17 kecamatan | 86 desa |
| DIY | 3.185,80 km² | 78 kecamatan | 438 kelurahan/desa |

Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2012

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak potensi daerah yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah diantaranya sektor swasta dapat menjadi andalan pemerintah untuk mengembangkan sumber daya yang ada dan mengoptimalkan sektor-sektor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota perjuangan, pusat pendidikan,

pusat kebudayaan, dan daerah tujuan wisata terkemuka yang memiliki potensi pesona alam dan budaya yang terkenal di Indonesia dan mancanegara. Daerah istimewa Yogyakarta yang relatif aman dan nyaman dengan keramah-tamahan masyarakatnya, menjadikan Yogyakarta menjadi tujuan wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Yogyakarta.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke D.I.Y
Tahun 2008-2012

| Tahun | Wisatawan Mancanegara | Wisatawan Nusantara | Pertumbuhan (%) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 2008 | 128.660 | 1.156.097 | 2,83 |
| 2009 | 139.492 | 1.286.565 | 11,00 |
| 2010 | 152.843 | 1.304.137 | 2,17 |
| 2011 | 169.565 | 1.438.129 | 10,34 |
| 2012 | 197.751 | 2.162.422 | 46,80 |

Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah)

Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tercatat dari tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2008 yaitu 128.600 meningkat pada tahun 2012 mencapai 197.751, dan jumlah wisatawan nusantara tahun 2008 yaitu 1.156.097 menjadi 2.162.422 pada tahun 2012. Sedangkan pertumbuhan kunjungan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif meningkat, tercatat persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,17 %, sedangkan persentase tertinggi pada tahun 2012 yaitu mencapai 46,80 %. Tidak heran jika jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara

yang datang ke Yogyakarta setiap tahunnya terus meningkatnya karena salah satu alasannya adalah Yogyakarta yang aman dan nyaman serta keramah-tamahan masyarakat Yogyakarta.

Sektor pariwisata memiliki peranan bagi pendapatan daerah dalam rangka pembangunan daerah selain itu juga retribusi, pajak, dan investasi menjadi sumber penerimaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan melakukan pembangunan daerah dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya pariwisata tentu akan mendatangkan berbagai dampak untuk daerah itu sendiri maupun dampak untuk nasional. Dilihat dari segi ekonomi sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar obyek wisata.

Tabel 1.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di DIY per Kabupaten/kota
tahun 2008-2010

| Kabupaten/kota | Tahun | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kota Yogyakarta | 132.431.572 | 161.482.657 | 178.761.030 |
| Kab. Sleman | 140.631.359 | 157.231.268 | 147.072.535 |
| Kab. Bantul | 69.800.762 | 88.691.363 | 90.238.880 |
| Kab. Kulonprogo | 42.286.238 | 39.358.628 | 44.416.717 |
| Kab. Gunungkidul | 32.907.615 | 38.455.406 | 39.756.345 |

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Jumlah perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008-2010 dilihat dari tabel diatas masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pendapatan. Kontribusi pendapatan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2008 sebesar 32.907.615, dan

kontribusi tertinggi adalah Kota Yogyakarta pada tahun 2010 yang mencapai 178.761.030.

Berdasarkan uraian diatas terdapat keterkaitan antara pendapatan sektor pariwisata, retribusi, pajak dan investasi dengan penerimaan daerah, oleh karena itu penulis membuat judul penelitian tentang ***“Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak, Retribusi, dan Investasi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta”***.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini. Selain itu perumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu alat untuk mengambil keputusan dari penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Seberapa besar pengaruh pajak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Seberapa besar pengaruh retribusi terhadap penerimaan pendapata asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
4. Seberapa besar pengaruh investasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahi pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui pengaruh pajak terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Mengetahui pengaruh retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Mengetahui pengaruh investasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan tujuan yang di atas, dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak maupun instansi terkait terhadap hasil penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - 1.1. Sebagai refrensi untuk melakukan penelitian yang terkait dalam penelitian ini.
 - 1.2. Sebagai sumber untuk menambah wawasan teori bagi pembaca.
 - 1.3. Sebagai bahan untuk menambah wacana kepustakaan, baik di tingkat fakultas sampai tingkat universitas.
2. Manfaat Praktis

- 2.1. Bagi pemangku kepentingan, dengan diketahuinya pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak, retribusi, dan investasi, maka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penelitian tersebut sehingga dapat diketahui dampak-dampak dari kebijakan tersebut dapat diatasi.
- 2.2. Secara umum penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan ilmu ekonomi dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber data baru yang bisa dikembangkan lagi dalam melakukan penelitian